

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi akhir – akhir ini diposisikan sebagai elemen krusial sehingga sulit dipisahkan dalam kehidupan manusia. Secara menyeluruh, fungsi teknologi dimanfaatkan sebagai instrumen dalam pencapaian tujuan yang berkaitan dengan keberlangsungan serta kenyamanan hidup masyarakat. Dari perspektif sosiologis, pemakaian teknologi tidak semata-mata dibatasi pada aspek permesinan sebagaimana kerap dipahami secara umum. Dalam ranah sosiologi, cakupan teknologi diartikan meliputi keseluruhan teknik produktif, termasuk perangkat keras dalam proses produksi, sistem manajemen kerja, serta pola organisasi kerja. Selain itu, teknologi dipergunakan sebagai sarana untuk peningkatan produktivitas suatu usaha. Melalui penggunaan instrumen tersebut, barang dapat dihasilkan oleh tenaga kerja dengan lebih mudah, sehingga produktivitas mereka dapat ditingkatkan sekaligus memengaruhi taraf pendapatan (Aryaningsih & Diatmika, 2021). Penerapan teknologi baru pada pasar tradisional merupakan salah satu langkah strategis agar pasar mampu berfungsi lebih efisien dalam memenuhi kebutuhan masyarakat (Masdiantini et al., 2022; Munawati *et al.*, 2024).

Sistem pembayaran dipahami sebagai suatu tatanan yang memuat seperangkat regulasi, institusi, serta mekanisme yang dioperasikan untuk merealisasikan alih dana dalam rangka pemenuhan kewajiban yang lahir dari suatu aktivitas ekonomi (Purnamawati et al., 2023). Demi menopang

pertumbuhan dunia usaha, kebutuhan akan penerapan sistem pembayaran berbasis jaringan internet dianggap esensial guna menggantikan pola pembayaran konvensional atau manual menuju mekanisme pembayaran secara daring (Darma & Devi, 2019; Yuniarta et al., 2021). Pada masa kini, sejumlah platform niaga telah mulai mengimplementasikan sistem pembayaran berlandaskan QRIS sebagai instrumen transaksi. Penerapan sistem pembayaran berbasis QRIS dinilai mampu menghadirkan efektivitas serta efisiensi pada beragam dimensi (Haholongan et al., 2024).

Salah satu layanan pada sistem pembayaran diwujudkan melalui pemindaian kode QRIS. Kode QRIS dipandang sebagai susunan simbol yang memuat informasi, antara lain identitas pedagang atau pengguna, nominal transaksi, serta jenis mata uang, yang dapat diterjemahkan oleh perangkat tertentu guna merealisasikan proses pembayaran. Teknologi QRIS dimungkinkan dengan penyimpanan data dalam wujud kode berupa pola titik-titik hitam. Pada tahap awal pemanfaatannya, aplikasi khusus masih dibutuhkan untuk membaca kode tersebut; namun, seiring dengan akselerasi perkembangan teknologi, pembacaan QRIS kini dapat dilakukan secara langsung melalui kamera gawai. Pemanfaatan QRIS diorientasikan pada beragam kepentingan, salah satunya sebagai alternatif instrumen pembayaran. Sistem pembayaran berbasis QRIS yang berkembang di Indonesia pada mulanya diimplementasikan dengan kode yang beragam. Untuk menanggulangi fragmentasi tersebut, Bank Indonesia kemudian memberlakukan standarisasi pada sistem pembayaran berbasis QRIS, sehingga kode yang semula bersifat eksklusif, hanya dapat diakses oleh penerbit asal, bertransformasi menjadi

inklusif dan dapat dikenali oleh penerbit lain, yang selanjutnya dikenal sebagai QRIS (Haholongan *et al.*, 2024).

Standar QR Code untuk transaksi pembayaran digital melalui e-wallet dan mobile banking telah diperkenalkan pada 17 Agustus 2019 oleh Bank Indonesia, dikenal dengan sebutan QRIS, dengan tujuan menciptakan masyarakat tanpa uang tunai. QRIS diposisikan sebagai suatu sistem baku dalam pembayaran melalui QR Code yang dirancang oleh Bank Indonesia, sehingga transaksi dapat terlaksana dengan lebih cepat, efisien, serta terjamin keamanannya. (Bank Indonesia, 2019). Melalui penerapan QRIS, transaksi dapat dilakukan oleh pengguna dengan pemindaian QR Code, tanpa harus memperhatikan QR Code yang disediakan oleh beragam pedagang (Kristina & Purnamawati, 2022). Di samping itu, salah satu keuntungan yang diperoleh oleh merchant adalah peningkatan potensi penjualan, karena Pembayaran dapat diterima melalui berbagai jenis QR Code (Bank Indonesia, 2019). Sayangnya, pemanfaatan QRIS yang difasilitasi oleh layanan mobile banking masih jarang diterapkan di kalangan Masyarakat (Wardani & Masdiantini, 2022).

Dalam implementasinya, QRIS masih dihadapkan pada beragam hambatan, salah satunya berupa rendahnya taraf literasi keuangan masyarakat Indonesia (Perdana & Sinarwati, 2022). Pemahaman mengenai keuangan digital dinilai masih terbatas serta belum terdistribusi secara merata. Data OJK menunjukkan selama periode enam tahun, yakni 2013 hingga 2019, nilai literasi keuangan hanya mengalami peningkatan sebesar 16,18%. Walaupun pertumbuhan pengguna QRIS tercatat meningkat pesat menurut Bank Indonesia, sebagian besar pedagang atau *merchant* masih belum memiliki pemahaman memadai, bahkan

sebagian di antaranya sama sekali belum mengetahui keberadaan QRIS. Di Indonesia, QRIS dikategorikan sebagai inovasi serta produk baru yang memerlukan masukan dari masyarakat, khususnya para pelaku usaha sebagai pengguna, terkait faktor-faktor yang memengaruhi keputusan dalam penerapan QRIS sebagai sistem pembayaran pada transaksi jual beli. Beberapa pandangan pengguna mencatat bahwa pemanfaatan layanan QRIS justru menimbulkan kompleksitas tambahan dan dirasa tidak memberikan manfaat yang signifikan. Namun, di sisi lain, terdapat pula pengguna yang lebih mengutamakan aspek efisiensi dan efektivitas, sehingga dikemukakan pandangan bahwa QRIS dapat dimanfaatkan untuk mempermudah sekaligus meningkatkan ketercukupan serta ketepatan dalam aktivitas pekerjaan mereka (Palupi, 2022).

Peningkatan pemanfaatan QRIS sebagai instrumen pembayaran digital telah teridentifikasi melalui data yang menunjukkan kenaikan jumlah pengguna, volume transaksi, serta nominal transaksi. Dari sisi pengguna, hingga akhir Oktober 2023 tercatat sebanyak 43,44 juta individu telah menggunakan QRIS, jumlah tersebut setara dengan 92% dari target total yang ditetapkan hingga akhir 2023, yakni 45 juta pengguna. Sementara itu, jumlah merchant yang telah menerima pembayaran melalui QRIS mencapai 29,63 juta, dengan proporsi terbesar berasal dari sektor UMKM sebesar 91,9%, terdiri atas usaha mikro 55,70%, usaha kecil 30,17%, usaha menengah 6,02%, dan usaha besar 3,74%. Volume transaksi menggunakan Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) hingga Oktober 2023 juga telah melampaui target yang ditetapkan Bank Indonesia. Sepanjang periode Januari hingga Oktober 2023, jumlah volume

transaksi tercatat sebesar 1,59 miliar dengan nilai nominal mencapai Rp24,97 triliun (Oktaviar *et al.*, 2024).

Berdasarkan (UU Nomor 20 Tahun 2008, suatu kegiatan bisnis yang dioperasikan oleh individu atau badan usaha dalam skala kecil atau mikro disebut Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Saat ini, sangat penting untuk mempromosikan kewirausahaan di negara-negara maju maupun dalam negara-negara yang sedang berkembang. Salah satu bentuk usaha yang kini tengah berkembang dan banyak diminati oleh masyarakat adalah UMKM (Putra & Devi, 2020). Kabupaten Jembrana yang berlokasi di Provinsi Bali telah mencatat peningkatan signifikan dalam jumlah pelaku UMKM. Indikasi tersebut tampak melalui tren pertumbuhan jumlah unit usaha yang konsisten mengalami kenaikan. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan (Koperindag) Kabupaten Jembrana, selama periode pandemi COVID-19, lonjakan jumlah UMKM di wilayah ini terbilang mencolok. Perkembangan kuantitas UMKM di Kabupaten Jembrana sepanjang tahun 2019 hingga 2023 senantiasa menunjukkan pertumbuhan signifikan seperti data berikut.

Tabel 1.1 *UMKM Development* Per Tahun Kabupaten Jembrana

No	Tahun	Jumlah
1	2019	27.654
2	2020	24.346
3	2021	48.277
4	2022	66.537
5	2023	67.183

(Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, 2022)

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat diidentifikasi bahwa pertumbuhan jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Jembrana dari tahun ke tahun senantiasa memperlihatkan peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini

mencerminkan semangat kewirausahaan masyarakat yang semakin tumbuh, serta dukungan berkelanjutan dari pemerintah daerah dan berbagai pihak terkait dalam mendorong perkembangan sektor UMKM. Meskipun demikian, berbagai persoalan yang berkaitan dengan kinerja UMKM masih terus dijumpai, terutama di wilayah Kabupaten Jembrana (Tabel 1.2).

Tabel 1.2 Performasi Kinerja UMKM di Provinsi Bali

No	Kabupaten/ Kota	Performa Kinerja Lebih Buruk	Presentase Performa Usaha
1	Buleleng	5.231	20,79%
2	Denpasar	4.308	17,12%
3	Gianyar	4.249	16,88%
4	Badung	3.594	14,28%
5	Tabanan	2.511	9,98%
6	Jembrana	2.370	9,42%
7	Bangli	1.222	4,86%
8	Karangasem	1.067	4,24%
9	Klungkung	614	2,44%
Total		25.166	100%

(Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023)

Data di atas merepresentasikan bahwasanya kinerja UMKM di Jembrana masih tergolong kurang memuaskan, dengan jumlah 2.360 unit atau sekitar 9,23%. Kondisi tersebut merefleksikan adanya kecenderungan stagnasi usaha yang tidak menunjukkan perkembangan signifikan dibandingkan dengan daerah lain. Kinerja usaha dalam konteks ini dipahami mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan peningkatan, penurunan, maupun stabilitas yang secara langsung memengaruhi dinamika pertumbuhan UMKM.

Literasi keuangan adalah langkah yang menilai seberapa baik seseorang memahami dan mengenali konsep finansial, yang nantinya akan dipakai untuk berinvestasi (Arisaputra & Masdiantini, 2024). Literasi keuangan di Kabupaten Jembrana masih terbilang rendah. Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan

(ANLIK) tahun 2022 menunjukkan adanya gap yang signifikan antara tingkat literasi dan inklusi di Bali, yakni mencapai 34,55%, dengan tingkat literasi sebesar 92,21% dan tingkat inklusi sebesar 57,66%. Meski Kabupaten Jembrana, sebagai bagian dari Provinsi Bali, mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat, terutama di sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), tantangan tetap ada.

Berdasarkan data dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Jembrana, jumlah UMKM meningkat secara drastis dari 10. 059 pada tahun 2017 menjadi 65. 520 pada tahun 2021. Pertumbuhan ini menggambarkan semangat kewirausahaan yang tinggi dalam masyarakat Jembrana. Namun, peningkatan jumlah UMKM tersebut tidak selalu diimbangi dengan peningkatan kualitas dalam pengelolaan keuangan. Banyak pelaku UMKM di Jembrana menghadapi beragam tantangan, seperti akses permodalan, pemasaran, sumber daya manusia, dan perizinan. Berdasarkan hasil wawancara, permasalahan utama yang dihadapi oleh UMKM berkaitan dengan akses permodalan dan pemasaran. Dalam konteks ini, literasi keuangan menjadi faktor kunci yang dapat membantu mengatasi berbagai tantangan tersebut. Dengan pemahaman yang baik tentang pengelolaan keuangan, pelaku UMKM dapat mengambil keputusan keuangan yang bijak, mengelola pendapatan dan pengeluaran, serta merencanakan investasi untuk pengembangan usaha.

Walaupun tidak ada data spesifik mengenai tingkat literasi keuangan di Kabupaten Jembrana, upaya untuk meningkatkan literasi keuangan tetap dilakukan. Salah satu contoh adalah program edukasi keuangan yang dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten

Jembrana, yang telah menjangkau 1. 000 UMKM dengan tema "Melalui Sertifikasi Halal." (Marini, 2024).

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Trisno Nugroho, menyampaikan bahwa tingkat literasi keuangan dan digital yang relatif baik hanya ditemukan di wilayah Denpasar, Badung, serta Gianyar. Sementara itu, daerah lainnya masih memperlihatkan capaian yang cenderung rendah yang mana dapat dianalisis dari total UMKM yang mengintegrasikan QRIS. Penggunaannya didominasi secara terpusat pada wilayah Denpasar, Badung, dan Gianyar (Wiratmini, 2021).

Tabel 1.3 Persentase Merchant yang Mengadopsi QRIS

No	Wilayah	Persentase Merchant yang Mengadopsi QRIS
1	Denpasar	49%
2	Badung	28%
3	Gianyar	8%
4	Buleleng	6%
5	Tabanan	4%
6	Jembrana	2%
7	Klungkung	2%
8	Karangasem	2%
9	Bangli	1%

(Sumber: Wiratmini, 2021)

Data di atas merepresentasikan bahwasanya Jembrana sebagai sebagian wilayah di Bali dengan pengintegrasian QRIS terendah, yakni hanya sebesar 1%. Keadaan ini dipandang krusial, sebab pengadopsian QRIS secara meluas semestinya telah dilakukan oleh UMKM guna memperluas serta mengoptimalkan perkembangan usahanya. Kendati demikian, implementasi pembayaran digital di kalangan UMKM masih menunjukkan variasi yang mencolok, terutama pada daerah-daerah terisolasi yang dihadapkan pada kendala keterbatasan infrastruktur maupun literasi digital. Dalam konteks ini, upaya untuk mendorong inklusi

keuangan digital bagi UMKM terus dilakukan oleh pemerintah serta pemangku kepentingan terkait, sehingga kemampuan adaptasi terhadap tren masyarakat tanpa uang tunai dapat ditingkatkan, sekaligus memperkuat daya saing usaha yang dijalankan.

Meskipun kemajuan teknologi informasi dan digitalisasi sistem pembayaran terus berkembang pesat, implementasi teknologi tersebut, khususnya sistem pembayaran digital QRIS, masih belum merata di kalangan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), terutama pedagang di pasar tradisional. Pemerintah telah melakukan berbagai inisiatif untuk mendorong penggunaan QRIS guna menciptakan efisiensi transaksi, meningkatkan inklusi keuangan, serta mendukung transformasi digital nasional (Masdiantini et al., 2024). Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa tingkat adopsi QRIS, seperti di Pasar Umum Negara, Kabupaten Jember, masih sangat rendah. Sebagian besar pedagang pasar tradisional masih enggan atau belum mampu mengadopsi QRIS karena berbagai kendala, antara lain rendahnya literasi digital dan keuangan, usia pengguna yang mayoritas berada di atas 40 tahun, persepsi terhadap kerumitan teknologi, dan minimnya sosialisasi dari pihak terkait. Padahal, penggunaan QRIS dinilai dapat meningkatkan daya saing dan kinerja UMKM di era ekonomi digital.

Kesenjangan antara potensi manfaat teknologi dengan kenyataan adopsi rendah ini menimbulkan pertanyaan besar, yaitu mengapa banyak pedagang pasar tradisional yang belum memanfaatkan QRIS sebagai sistem pembayaran digital, meskipun data menunjukkan tren pertumbuhan pengguna dan transaksi QRIS yang sangat positif secara nasional. Fenomena ini mencerminkan adanya kesenjangan antara harapan kebijakan dan kenyataan implementasi di level pelaku

usaha akar rumput, yang perlu dikaji lebih dalam untuk menemukan faktor-faktor utama yang memengaruhi rendahnya minat penggunaan QRIS, khususnya dari sisi kemanfaatan, kepuasan, dan risiko.

Pasar Umum Negara merupakan salah satu pasar Tradisional yang baru saja di bangun pada tahun 2024, dimana di tengah percepatan transformasi digital, pemerintah semakin menekankan pada modernisasi sistem pembayaran guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Di sektor pasar umum, yang selama ini menjadi jantung interaksi perdagangan tradisional, penerapan sistem pembayaran digital seperti *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) telah ditetapkan sebagai standar wajib. Kebijakan ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi transaksi, tetapi juga untuk mendukung inklusi keuangan serta mendorong keterlibatan UMKM dalam ekosistem digital.

Fenomena dari penelitian ini, dimana pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mendorong penggunaan QRIS, adopsinya di kalangan pedagang pasar tradisional masih tergolong rendah. Berdasarkan observasi awal di beberapa pasar umum, khususnya di Pasar Umum Negara ditemukan bahwa sebagian besar pedagang belum menggunakan QRIS dalam aktivitas transaksinya sehari-hari. Salah satu faktor dominan yang menyebabkan rendahnya pemanfaatan QRIS adalah keterbatasan pengetahuan dan pemahaman terhadap teknologi digital. Hal ini diperparah oleh fakta bahwa mayoritas pedagang di pasar-pasar tersebut berada pada rentang usia 40 tahun ke atas, yang secara umum kurang akrab dengan penggunaan perangkat digital seperti smartphone dan aplikasi pembayaran. Selain itu, sebagian pedagang merasa bahwa sistem pembayaran digital seperti QRIS terlalu rumit dan tidak sepraktis pembayaran tunai. Persepsi

ini mencerminkan masih rendahnya literasi digital di kalangan pedagang pasar, serta terbatasnya sosialisasi dan pendampingan teknis dari pihak terkait. Padahal, dengan meningkatnya tren masyarakat dalam menggunakan metode pembayaran digital, penggunaan QRIS seharusnya dapat menjadi peluang bagi pelaku UMKM untuk lebih kompetitif dan efisien dalam melayani konsumen.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan peneliti di Pasar Umum Negara Bahagia, dari total sekitar 300 pedagang yang berjualan, hanya sebagian yang telah mengenal dan menggunakan QRIS sebagai alat pembayaran digital. Hasil pengumpulan data menunjukkan bahwa sebanyak 29 pedagang (9,7%) telah aktif menggunakan QRIS dalam kegiatan transaksinya. Sementara itu, terdapat 37 pedagang (12,3%) yang sebelumnya pernah menggunakan QRIS, namun saat ini telah berhenti atau tidak lagi menggunakannya karena berbagai alasan, seperti keluhan terhadap potongan biaya transaksi, kendala teknis, atau kurangnya pemahaman digital. Selain itu, terdapat 89 pedagang (29,7%) yang menyatakan bahwa mereka telah mengetahui atau memahami QRIS, namun belum pernah mencobanya dalam aktivitas jual beli. Artinya, lebih dari separuh jumlah pedagang (145 orang atau sekitar 48,3%) masih berada di luar cakupan penggunaan QRIS, baik karena belum mengetahui, tidak tertarik, atau belum merasa membutuhkannya.

Teori *Technology Acceptance Model* (TAM) yang dijelaskan oleh Jogianto dalam jurnalnya (Fahlevi dan Dewi, 2019) merupakan sebuah kerangka model yang dirancang untuk memahami dan menyelidiki berbagai faktor yang memengaruhi penerimaan teknologi. Model ini diperkenalkan oleh Fred Davis pada tahun 1986, dengan tujuan untuk menggambarkan dan mengevaluasi

bagaimana pelanggan mengadopsi teknologi. TAM dianggap sangat efektif dalam menjelaskan proses adopsi teknologi secara unik. Berdasarkan penjelasan dari Davis, *Technology Acceptance Model* berfungsi untuk memprediksi dan menggambarkan cara pengguna menerima serta memanfaatkan teknologi yang berkaitan dengan pekerjaan mereka. Dalam keterkaitannya dengan teori TAM (Technology Acceptance Model), tiga komponen utama kerap diasosiasikan dengan Sistem Informasi Akuntansi. Pertama, *Perceived Usefulness* dimaknai sebagai keyakinan bahwa pemanfaatan teknologi berkontribusi pada peningkatan kinerja. Kedua, *Perceived Ease of Use* dipahami sebagai tingkat kemudahan yang dialami seseorang ketika menggunakan teknologi. Ketiga, aspek *Attitude*, *Behavioral Intention*, dan *Behavior* digambarkan sebagai sikap penerimaan maupun penolakan yang bersifat positif ataupun negatif terhadap penggunaan teknologi (Medina et al., 2021).

Sejumlah penelitian sebelumnya telah dilakukan untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang memengaruhi penggunaan QRIS sebagai sistem pembayaran digital. Sebagai contoh, penelitian yang dilakukan oleh Palupi (2022) mengungkapkan bahwa kemudahan dalam menggunakan sistem QRIS memiliki dampak signifikan terhadap keputusan pelaku UMKM untuk mengadopsi QRIS sebagai metode pembayaran. Namun, penelitian ini terbatas pada aspek literasi keuangan tanpa menyelidiki lebih dalam pengaruh kepuasan dan risiko yang terkait dengan penggunaan QRIS.

Haholongan *et al.*, (2024) meneliti sosialisasi penggunaan QRIS di kalangan pelaku usaha ikan hias di Jatinegara. Penelitian ini menekankan pentingnya penjelasan dan penyuluhan terkait QRIS agar lebih banyak dikenal

dan dimanfaatkan oleh pelaku usaha. Namun, penelitian ini tidak secara empiris mengkaji pengaruh faktor kemanfaatan, kepuasan, dan risiko terhadap minat penggunaan QRIS.

Di sisi lain, Oktaviar *et al.*, (2024) menginvestigasi pengaruh kualitas pelayanan, kepercayaan, dan kenyamanan terhadap keputusan untuk menggunakan QRIS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kenyamanan dan kepercayaan memainkan peran penting dalam perilaku pengguna QRIS. Meskipun memberikan pemahaman yang berharga tentang perilaku pengguna, konteks penelitian ini tidak secara spesifik menargetkan pedagang pasar tradisional.

Penelitian oleh Wiratmini (2021) mengindikasikan bahwa adopsi QRIS di Bali masih belum merata, dengan pengguna terbanyak berada di wilayah Denpasar, Badung, dan Gianyar, sementara daerah lain seperti Jembrana mengalami tingkat adopsi yang rendah. Namun, penelitian ini bersifat deskriptif dan tidak mengkaji variabel kemanfaatan, kepuasan, maupun risiko terhadap minat penggunaan QRIS.

Dari kajian-kajian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa terdapat kekurangan dalam penelitian yang mengeksplorasi pengaruh kemanfaatan, kepuasan, dan risiko QRIS terhadap minat pedagang pasar tradisional, khususnya di Kabupaten Jembrana yang masih memiliki angka adopsi QRIS yang rendah. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah yang berarti dalam menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi minat penggunaan QRIS di kalangan pedagang lokal di Pasar Umum Negara Bahagia.

Penelitian ini memiliki perbedaan yang mendasar jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu. Fokus utama dalam penelitian ini adalah untuk

menguji pengaruh kemanfaatan, kepuasan, dan risiko terhadap minat pedagang pasar tradisional di Pasar Umum Negara Bahagia, Kabupaten Jember dalam mengadopsi QRIS sebagai sistem pembayaran digital. Penelitian ini secara khusus meneliti pengaruh faktor-faktor seperti kemanfaatan, kepuasan, dan risiko terhadap keputusan penggunaan QRIS, yang belum banyak dibahas secara komprehensif dalam penelitian sebelumnya. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih banyak berfokus pada variabel kemudahan penggunaan QRIS dan literasi keuangan (seperti yang dilakukan oleh Palupi (2022), atau meneliti pengaruh kualitas layanan dan kenyamanan terhadap keputusan penggunaan QRIS (seperti yang dilakukan oleh Oktaviar *et al.*, 2024), namun tidak menguji secara mendalam pengaruh kepuasan dan risiko dalam penggunaan QRIS. Selain itu, penelitian ini menargetkan subjek yang lebih spesifik, yaitu pedagang pasar tradisional, yang merupakan kelompok yang belum banyak diteliti dalam konteks penggunaan QRIS, sementara sebagian besar penelitian terdahulu lebih banyak meneliti UMKM secara umum. Dalam penelitian ini juga diterapkan pendekatan kuantitatif untuk menguji hubungan antar variabel yang ada, sedangkan penelitian terdahulu lebih banyak mengedepankan aspek sosialisasi dan penyuluhan QRIS tanpa menganalisis secara kuantitatif pengaruh variabel-variabel tersebut terhadap keputusan adopsi QRIS. Dengan demikian, perbedaan utama terletak pada fokus variabel yang diteliti, yaitu kemanfaatan, kepuasan, dan risiko, serta penggunaan subjek yang lebih spesifik, yakni pedagang pasar tradisional, yang belum banyak dikaji dalam penelitian sebelumnya, dan penerapan metode penelitian kuantitatif untuk mengukur pengaruh dari faktor-faktor tersebut terhadap minat pedagang dalam menggunakan QRIS.

Berdasarkan permaparan latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH KEMANFAATAN, KEPUASAN, DAN RISIKO PENGUNAAN QRIS TERHADAP MINAT PADA PEDAGANG LOKAL DI PASAR UMUM NEGARA BAHAGIA.”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas maka dapat disimpulkan identifikasi masalah sebagai berikut.

- 1) Menyelidiki adopsi QRIS di pasar Umum Negara Bahagia, Kabupaten Jembrana, dengan fokus pada pola penggunaan dan penerimaan oleh pengguna dan pedagang lokal.
- 2) Menganalisis dampak QRIS terhadap kemudahan transaksi, penetrasi pasar UMKM, dan efisiensi sistem pembayaran di tingkat lokal.
- 3) Mengevaluasi persepsi dan kepuasan pengguna terhadap penggunaan QRIS sebagai metode pembayaran alternatif

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan pemaparan identifikasi masalah diatas, maka penelitian ini membatasi masalah hanya sebagai berikut.

- 1) Penelitian ini akan difokuskan pada penggunaan QRIS di pasar Umum Negara Bahagia, Kabupaten Jembrana, Bali, pada tahun 2024.

- 2) Fokus utama adalah pada karakteristik dan perilaku pengguna QRIS di pasar Umum Negara Bahagia, termasuk preferensi penggunaan, frekuensi transaksi, dan kepuasan pengguna terhadap penggunaan QRIS

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang dipaparkan di atas, adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

- 1) Bagaimana pengaruh kemanfaatan QRIS sebagai alat pembayaran digital terhadap minat pedagang lokal di Pasar Umum Negara Bahagia.
- 2) Bagaimana pengaruh kepuasan QRIS sebagai alat pembayaran digital terhadap minat pedagang lokal di Pasar Umum Negara Bahagia.
- 3) Bagaimana pengaruh risiko QRIS sebagai alat pembayaran digital terhadap minat pedagang lokal di Pasar Umum Negara Bahagia.
- 4) Bagaimana pengaruh kemanfaatan, kepuasan, dan risiko QRIS secara simultan sebagai alat pembayaran digital terhadap minat pedagang lokal di Pasar Umum Negara Bahagia.

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan di atas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

- 1) Menjelaskan pengaruh kemanfaatan QRIS sebagai alat pembayaran digital terhadap minat pedagang lokal di Pasar Umum Negara Bahagia.

- 2) Menjelaskan pengaruh kepuasan QRIS sebagai alat pembayaran digital terhadap minat pedagang lokal di Pasar Umum Negara Bahagia.
- 3) Menjelaskan pengaruh risiko QRIS sebagai alat pembayaran digital terhadap minat pedagang lokal di Pasar Umum Negara Bahagia.
- 4) Menjelaskan pengaruh kemanfaatan, kepuasan, dan risiko QRIS secara simultan sebagai alat pembayaran digital terhadap minat pedagang lokal di Pasar Umum Negara Bahagia.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pengguna dalam beralih dari sistem pembayaran tradisional ke QRIS. Hal ini berkontribusi pada pengembangan teori adopsi teknologi, khususnya dalam konteks sistem pembayaran di pasar lokal.

1.6.2 Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- 1) Memberikan wawasan praktis tentang manfaat penggunaan QRIS, baik dalam meningkatkan efisiensi transaksi, mempercepat proses pembayaran, maupun memperluas pasar melalui sistem pembayaran digital yang lebih modern.

- 2) Menyediakan informasi terkait dengan faktor-faktor yang dapat membantu pedagang untuk lebih mudah mengadopsi dan memanfaatkan sistem pembayaran berbasis QRIS dalam kegiatan bisnis mereka.

